

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Irmawati

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: mawatialkasi95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sinjai. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 134 orang masyarakat desa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan nilai selisih mutlak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian yang dilakukan Atmadjaya dan Saputra (2018), dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan kepadanya. Pengelolaan keuangan desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Beberapa penelitian di lapangan menemukan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah di desa masih sangat rendah. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa menjadi berita hangat yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini, bahkan pemberitaan di media massa pun sering menyajikan berita miring tersebut. Salah satu pemberitaan media massa menyebutkan bahwa hampir 75 ribu desa di Indonesia yang mengelola dana desa, sekitar 200 diantaranya terkena operasi tangkap tangan karena menyelewengkan dana desa.

Alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah kepada desa tentunya diharapkan mampu membantu pengembangan desa. Namun dalam proses pengembangan desa itu sendiri membutuhkan pengelolaan yang tepat. Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Diantaranya, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Barat.

Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa juga dipaparkan dalam hasil kajian yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi pada tahun 2014. Terkait dengan

pengelolaan keuangan desa, komisi pemberantasan korupsi mengungkapkan beberapa permasalahan yang muncul yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, penyusunan APBDes tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi (Putra, 2015). Hal inilah yang mengakibatkan akuntabilitas keuangan desa masih dikategorikan rendah. Olehnya itu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dipandang penting dan juga turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat berawal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran. Menurut Kim dan Schachter (2013) partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Beberapa fenomena yang dipaparkan mengisyaratkan adanya pengelolaan keuangan yang menyimpang dari dimensi akuntabilitas terutama terkait dengan akuntabilitas hukum/kejujuran dan akuntabilitas keuangan. Kepala desa yang menjadi tersangka melakukan pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan tindakan korupsi sehingga hal ini bertentangan dengan esensi akuntabilitas itu sendiri. Fenomena ini juga bertolak belakang dengan teori stewardship yang menjadi acuan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang diasumsikan teori stewardship bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi ditujukan untuk kepentingan organisasi. Dalam artian, kepala desa harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat desa dibandingkan kepentingan diri sendiri.

Teori stewardship memandang bahwa manajemen sebagai steward akan bertindak arif, bijaksana, dan penuh kesadaran yang berorientasi pada kepentingan organisasi. Steward pada organisasi sektor publik percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan masyarakat sebagai principal. Steward percaya bahwa jika tujuan principal dapat dipenuhi, maka akan memberikan dampak terhadap kepercayaan principal kepada steward. Kepala desa bertindak sebagai steward yang menerima amanah dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan berhasil jika dilakukan secara akuntabel. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi kepala desa (steward) sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat. Tugas dan fungsinya berupa membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diamanatkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Masyarakat sebagai lingkungan terdekat pemerintah desa yang merupakan subjek strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu andalan utama demokrasi, dan secara tak terelakkan mempengaruhi tujuan kebijakan publik (Carreira dan Vasconcelos, 2016). Partisipasi mengacu pada keterlibatan langsung publik dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme formal dan informal (Kulozu, 2016).

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan.

KAJIAN TEORI

Teori Stewardship

Teori stewardship adalah bagian dari teori agensi yang menggambarkan kondisi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi ditujukan untuk kepentingan organisasi (Donalson dan Davis, 1991). Teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Warongan, 2015). Teori stewardship memandang bahwa manajemen sebagai steward akan bertindak arif, bijaksana, dan penuh kesadaran yang berorientasi pada kepentingan organisasi. Steward pada organisasi sektor publik percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan masyarakat sebagai principal. Steward percaya bahwa jika tujuan principal dapat dipenuhi, maka akan memberikan dampak terhadap kepercayaan principal kepada steward.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa bertindak sebagai steward yang menerima amanah dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan berhasil jika dilakukan secara akuntabel. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi kepala desa (steward) sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat yakni membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diamanatkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Konsep teori stewardship didasarkan pada asas kepercayaan kepada pihak yang diberikan wewenang. Steward dipandang sebagai good steward yang melaksanakan tugas secara penuh tanggungjawab. Good steward dapat diwujudkan jika steward tersebut memiliki kompetensi dan komitmen. Kompetensi sangat diperlukan oleh steward untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Sedangkan komitmen diperlukan agar steward dapat bertindak kooperatif demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, teori stewardship dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan variabel kompetensi sumber daya manusia dan komitmen dalam hubungannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini mengasumsikan tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi

mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang dihubungkan (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Malle, 2011). Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Malle (2011) menyatakan bahwa terdapat atribusi internal (atribut personal) dan atribusi eksternal (atribut lingkungan) yang bersama-sama memengaruhi perilaku manusia. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor lingkungan.

Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan variabel partisipasi masyarakat dan budaya sebagai atribusi yang memengaruhi steward melakukan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel. Budaya merupakan atribut internal yang berupa budi dan akal manusia yang secara instrinsik memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga memiliki perasaan kelangsungan hidup yang lebih baik (McCuddy dan Pirie, 2007). Adanya budaya yang dimiliki steward akan mengarahkannya melakukan pengelolaan keuangan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hipotesis

Masyarakat sebagai lingkungan terdekat pemerintah desa merupakan subjek strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi publik merupakan salah satu andalan utama demokrasi dan secara tak terelakkan mempengaruhi tujuan kebijakan publik (Carreira dan Vasconcelos, 2016). Partisipasi mengacu pada keterlibatan langsung publik dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan.

Partisipasi masyarakat berawal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran. Menurut Kim dan Schachter (2013) partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah. Berdasarkan teori atribusi, Malle (2001) menyatakan bahwa terdapat atribusi internal (atribut personal) dan atribusi eksternal (atribusi lingkungan) yang bersama-sama mempengaruhi perilaku manusia. Dalam penelitian ini, atribusi eksternal yang dimaksudkan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk memantau apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa,

dari perencanaan anggaran desa melalui akuntabilitas keuangan. Dalam melakukan pengawasan ini, pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menilai akuntabilitas dana publik diperlukan.

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah mereka sendiri (Fung, 2002; Samah dan Aref, 2009). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat (Franklin, Ho dan Ebdon, 2009; Kahn dan Kenney, 1997). Selain itu, partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Halachmi dan Holzer, 2010), akuntabilitas dan kinerja (Suebvises, 2018), serta sustainable development goals. Partisipasi masyarakat meningkatkan pembangunan desa.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Tumbel, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Kazimoto (2013) yang menyatakan laporan keuangan yang dihasilkan dan didistribusikan kepada anggota masyarakat tidak menunjukkan aktivitas sesungguhnya padahal proses perencanaan keuangan telah melibatkan masyarakat. Penelitian Kazimoto (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum memiliki efek positif bagi kinerja organisasi.

Berdasarkan hal di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

Ha: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa budaya sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sinjai terdiri dari orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menilai akuntabilitas publik, seperti masyarakat 67 desa di Sinjai. Masing-masing memiliki sebanyak dua orang yang mewakili setiap desa di Kecamatan Sinjai. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan survei lapangan yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Tahapan dalam penyebaran dan pengumpulan kuesioner dibagi menjadi dua tahap yaitu pertama, menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa dan pengelola dana masyarakat yang menjadi

sampel penelitian, kemudian menunggu pengisian kuesioner. Kedua, pengambilan kuisisioner yang telah diisi oleh responden untuk dilakukan pengolahan data.

Penelitian ini menggunakan instrumen angket, untuk mengetahui gambaran variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, komitmen, dan budaya. Pengukuran masing-masing instrumen menggunakan skala ordinal. Jawaban responden terhadap kuesioner dinilai menggunakan skala Likert lima poin. Skala likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju dengan pernyataan tersebut menggunakan skala lima poin berikut (have now dan Bougie, 2016).

1. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.
2. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.
3. Netral (N) dengan skor 3.
4. Setuju (S) dengan skor 4.
5. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian kualitas data yang terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas. Kuesioner dianggap valid jika pernyataan-pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Apakah keputusan bahwa setiap indikator valid bila r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel. Adapun cara menghitung tingkat reliabilitas data dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.

Selanjutnya dengan melakukan analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik pada uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan nilai selisih mutlak. Model yang dikembangkan untuk analisis ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1x_1 + e$$

Informasi:

Y : akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

a : konstanta

b₁ : Arah koefisien regresi

X₁ : Partisipasi Masyarakat

e : error

HASIL PENELITIAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mendapatkan data dari responden. Pengukuran masing-masing instrumen menggunakan skala ordinal (likert). Data yang telah

dikumpulkan akan diuji dengan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data tersebut sebelum diolah lebih lanjut.

1. Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut. Pengujian validitas dengan menggunakan *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara membandingkan r hitung dan r tabel. Jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel, maka data tersebut valid. Sebaliknya jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel, maka data tersebut tidak valid (Ghozali, 2013). Hasil pengujian validitas untuk data penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 1 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	X1.1	X3.1.1	0,828	0,169	Valid
		X3.1.2	0,899	0,169	Valid
		X3.1.3	0,923	0,169	Valid
	X1.2	X3.2.1	0,871	0,169	Valid
	X1.3	X3.3.1	0,904	0,169	Valid
		X3.3.2	0,905	0,169	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y1	Y1.1.	0,790	0,169	Valid
		Y1.2	0,790	0,169	Valid
		Y1.3	0,772	0,169	Valid
	Y2	Y2.1	0,712	0,169	Valid
		Y2.2	0,557	0,169	Valid
	Y3	Y3.1	0,693	0,169	Valid
		Y3.2	0,753	0,169	Valid
		Y3.3	0,716	0,169	Valid
	Y4	Y4.1	0,589	0,169	Valid
		Y4.2	0,458	0,169	Valid
		Y4.3	0,453	0,169	Valid
	Y5	Y5.1	0,598	0,169	Valid
		Y5.2	0,563	0,169	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk semua item diperoleh nilai r -hitung yang lebih besar dari nilai r -tabel. Semua item yang telah diuji memiliki r -hitung di

atas nilai r-tabel yaitu 0,169, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada instrumen tersebut valid.

2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013). Berikut ini disajikan hasil pengujian reliabilitas data penelitian.

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Standar Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,70	0,947	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa (Y)	0,70	0,889	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha seluruh variabel lebih besar dari nilai standar koefisien alpha 0,70. Hal ini berarti bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel (handal).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian memberikan gambaran suatu data. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Data sampel yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 134. Statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Minimum	Maximum	Rata-rata	Std.Deviasi
Partisipasi Masyarakat (X3)	1	5		3,61
Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa (Y)	1	4		3,98

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, Partisipasi masyarakat memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Hal ini berarti, nilai terkecil dari jawaban responden adalah Sangat Tidak Setuju (STS) dan nilai terbesar dari jawaban responden adalah Sangat Setuju (SS). Adapun nilai rata-rata dari jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 3,61 dengan nilai penyimpangan (standar deviasi) sebesar 0,66. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean pada variabel komitmen mengindikasikan bahwa, nilai mean merupakan representatif yang baik dari keseluruhan data yang ada dalam penelitian.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Hal ini berarti, nilai terkecil dari jawaban responden adalah Sangat Tidak Setuju (STS) dan nilai terbesar dari jawaban responden adalah Setuju (S). Adapun nilai rata-rata dari jawaban responden untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 3,98 dengan nilai penyimpangan (standar deviasi) sebesar 0,43. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean pada variabel komitmen mengindikasikan bahwa, nilai mean merupakan representatif yang baik dari keseluruhan data yang ada dalam penelitian.

Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *nilai selisih mutlak*. Analisis regresi ini dilakukan dengan dua tahap pengujian. Tahap pertama adalah regresi sebelum berinteraksi dengan variabel moderasi. Tahap kedua adalah regresi yang dilakukan setelah berinteraksi dengan variabel moderasi.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi

Variabel Independen	Koefisien	Sig.	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,374	0,000	Signifikan
$\alpha = 5\% = 0,05$			
R square = 0,598			

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Nilai koefisien determinasi *R square* pada hasil pengujian di atas menunjukkan nilai 0,598 atau 59,8%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi sebesar 59,8% oleh variabel partisipasi masyarakat (X1). Adapun sisanya sebesar 40,2% dipengaruhi variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Syarat terdukungnya suatu hipotesis penelitian adalah jika pengaruh dan/atau arah variabel sejalan dengan yang dihipotesiskan. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Hasil analisis regresi untuk hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki nilai probabilitas 0,000 ($<0,050$). Nilai ini mengindikasikan bahwa hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan. Selain itu, nilai koefisien untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,374 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa adalah positif. Nilai koefisien yang bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan yang searah. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa” diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara empiris dapat dibuktikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada wilayah Kabupaten Sinjai. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Murtiono (2016), Wampler (2002) yang menyatakan bahwa semakin baik pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintah desa yang pada akhirnya akan menimbulkan kemandirian desa itu sendiri.

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga harus menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Mewujudkan partisipasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara untuk membangun desa menjadi maju dan mandiri. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sangat penting karena masyarakat sendirilah yang tahu apa yang mereka butuhkan sehingga adanya partisipasi maka setiap pembangunan yang dilakukan di desa merupakan kebutuhan warga desa. Kim dan Schacher (2013) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pemerintahan yang lebih baik, karena dengan mewujudkan partisipasi akan membuat jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat dan akhirnya menjadikan pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggungjawab kepada warganya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang diatribusikan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Malle, 2011). Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Malle (2011) menyatakan bahwa terdapat atribusi internal (atribut personal) dan atribusi eksternal (atribut lingkungan) yang

sama-sama memengaruhi perilaku manusia. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dinilai sebagai atribut eksternal yang mampu memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam artian bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk memantau apa yang sedang dilakukan oleh aparat pengelola dana desa untuk menunjang terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Adapun dalam deskripsi variabel penelitian ini ditemukan bahwa akses bagi masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan merupakan indikator dengan rata-rata terendah. Hal ini berarti bahwa masyarakat dalam proses perencanaan diberikan akses untuk menyalurkan idenya. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan, maka kepala desa masih tetap menjadi aktor penentu keputusan tertinggi. Dimana akses bagi masyarakat dinilai masih kurang dalam hal partisipasi karena penentu keputusan akhir adalah kepala desa. *Steward/eksekutif* yang dipercaya oleh masyarakat setempat senantiasa memberikan pelayanan yang baik, perlu membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang diamanahkan kepadanya secara transparan. Dengan terbatasnya akses bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dinilai masih rendah yang dimiliki oleh aparat pengelola di desa mengindikasikan bahwa aparat dapat melakukan praktik organisasi yang tidak sehat serta memicu terjadinya penyalahgunaan jabatan yang berujung pada rendahnya akuntabilitas keuangan.

Sedangkan untuk mewujudkan partisipasi yang efektif, pemerintah desa dan masyarakat harus mengetahui apa saja perannya. Masyarakat sebagai aktor utama pembangunan harus berperan aktif mewujudkan apa yang mereka inginkan, sedangkan pemerintah berperan menciptakan ruang dan mendorong agar partisipasi itu dapat berjalan. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan desa impian yang harus dilakukan adalah pemerintah harus mendelegasikan pengambilan keputusan kunci pada masyarakat desa, sebab tanpa adanya hal tersebut maka masyarakat desa akan terus terkungkung dan tidak memiliki ruang untuk menyalurkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Menurut perspektif yang berbeda, partisipasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah semata. Seperti halnya peningkatan kualitas keputusan karena dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat, melainkan partisipasi aktif masyarakat menjadi proses untuk menstimulasi keahlian masyarakat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan diri serta pengetahuan (Samah dan Aref, 2009).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang dianggap sangat penting. Hal tersebut karena semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang akan berimplikasi pada pembangunan desa yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat berada pada kategori sangat tinggi (Tabel 5.8).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Halachmi dan Holzer, 2010) serta partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan kinerja (Suebvises, 2018). Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa cenderung meningkat.

KESIMPULAN

Berdasar hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya peningkatan partisipasi masyarakat akan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian ini mengkonfirmasi teori atribusi, yaitu dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat akan mengarahkan steward melakukan pengelolaan keuangan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebab ada atribut eksternal yang memengaruhinya, dalam hal ini atribut eksternal yang dimaksudkan adalah partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaya, A. T., and Saputra, K. 2018. *Determinant Factors Influencing the Accountability of Village Financial Management*. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 17, Issue 1.
- Bordieu, P. 1986. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge-University Press
- Carreira, V., Machado, J., and Vasconcelos, L. 2016. *Engaging Citizen Participation- A Result of Trusting Governmental Institutions and Politicians in the Potruguese Democracy*. Social Science. 5 (3), 40.
- Cavoukin, Ann, Taylor, S., and Abrams, M. 2010. *Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices*. Vol. 3.
- Donaldson, L. and Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Stakeholder Return*. Australian Journal of Management, Vol.16, No.1.
- Franklin, A. L., Ho, A. T., and Ebdon, C. 2009. *Participatory Budgeting in Midwestern State: Democratic Connection or Citizen Disconnection?*. Public Budeting & Finance, 29 (3), 52-73.
- Fry, Louis W., Laura L, Matherly., and J-Robert, Ouimet. 2010. *The Sprituality Leadership Balance Scorecard Business Model*. Journal of Management, Sprituality, and Religion, Vol. 7.
- Fung, A. 2002. *Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy*. Priceton: Priceton University Press.
- Goddard, Andrew. 2005. *Reform as Regulation-Accounting, Governance and Accountability in UK Local Goverment*. Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 1.
- Halachmi, A., and Holzen, M. 2010. *Citizen Participation and Performance Measurement: Operationalizing democracy Throught Better Accountability*. Public Administration Quarterly, 34 (3), 378-399.
- Herry, P., Endar, P., and Biana, A. 2017. *Determinant of Village Financial Accountability in Sumbawa and West Sumbawa District*. International Conference and Call Paper, Jember.
- Hutapea, P. And Thoha, N. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Iyoha, F.O and Oyerinde, D. 2009. *Accounting Infrastructure and Accountability in the Management of Public Expenditure in Developing Countries: A Focus on Nigeria*. Critical Perspectives on Accounting 21, 361-373.
- Jensen, M. C., and W. H. Meekling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. 3 (4): 305-360.
- Jewel, L.N. dan Siegell, M. 1998. Psikologi Industri/Organisasi Modern. Jakarta: Arcan.
- Kadir, A., Kiswanto N. W., David I. G., Dani P. 2017. *The Indonesian Perspectives on Village Financial Management Accountability*. International Journal of Economic, Business and Management Research. ISSN: 2456-7760. Vol. 1, No. 04.
- Kahn, K. F., and Kenney, P. 1997. *A Model of Candidate Evaluations in Senate Election: The Impact of Campaign Intensity*. Journal of Politics, 59 (4), 1173-1205.
- Kim, S., and Schachter, H. L. 2013. *Citizen Participation in the Budget Process and Local Government Accountability*. Public Performance and Management Review, 36 (3), 456-471.
- Kitta, S., Rakhmat, Heri, T., and Andi, M. 2014. *Analysis of Determinant Factors in Regional Financial Management Accountability in Local Government at Maros Regency*. International Journal of Academic Research, Vol. 6, No. 3.
- Kulozu, N. 2015. *Participation as a Mean to an End or as an End in Itself: The Success Evaluation of Participants*. Turkish Public Administration Annual, 41-42, 83-102.
- Mada, Syarifuddin. Lintje, K., and Hendrik G. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Malle, Bertram F. 2011. *Attribution Theories: How People Make Sense of Behavior*. Wiley-Blackwell.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Manopo, D. C. 2016. *Implementation of Accountability in the Implementation of the Village Government (Study In Warisa Village, District Talawaan, North Minahasa Regency)*. Executive Journal, Vol. 1, No. 7.
- McCuddy, M. And Pirie W. L. 2007. *Spirituality, Stewardship, and Financial Decision-Making: Toward a Theory of Intemporal Stewardship*. Managerial finance, Vol. 33.
- Mongilala, C. 2016. *Juridical Research Fund Management and Accountability Regarding Village in South Minahasa District*. Lex et Societatis, Vol. IV No. 6.
- Mowday, R., Porter L., and Steers R. 1982. *The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover*. New York: Academic Press.
- Murtiono, Y. 2016. Modul Tata Kelola Keuangan Desa. (H. Prasetya, Ed.) (1). Yogyakarta: Retrieved from www.infest.or.id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2014. Jakarta: Departemen Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Riyan, N. 2016. *The Village Fund Management Analysis (Case Study In the Village Singopran Kartasura District of Sukoharjo, Faculty of Teacher Training and education, Muhammadiyah University of Surakarta*.
- Samah, A. A., and Aref, F. 2009. *People's Participation in Community Development: A Case study in a Planned Village Settlement in Malaysia*. World Rural Observation, 1(2), 45-54.
- Sekaran, U. And Bougie R. 2016. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Spencer, P. M., and Spencer, S. M. 1993. *Competence at Work "Models for Superior Performance"*. New york: John Wiley and Sons Inc.
- Suebvises, P. 2018. *Social Capital, Citizen Participation in Public Administration, and Public Sector Performance in Thailand*. World Development, 109, 236-248.
- Syarifuddin, A. 2014. *Influence of HR Competency and Role of Internal Audit on the Quality of Local Government Finance Report to the Government Intervening Variable Internal Controlling System (Empirical Stdy in Kebumen Regency)*. Business focus Journal, Volume 14, No. 02.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Jakarta: Departemen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.